

LAMPIRAN X  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 20/16/PADG/2018  
TANGGAL 15 AGUSTUS 2018  
TENTANG  
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP  
RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK  
DOMESTIK

CONTOH SURAT KUASA

- A. CONTOH SURAT KUASA UNTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)
1. DALAM HAL PEMBERI KUASA ADALAH DIREKSI DAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA INI TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

SURAT KUASA<sup>1</sup>

Pada hari ini, ....., tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:
2. Nama

:
- Jabatan

:
- Alamat

:
- Nomor Identitas

:

bertindak berdasarkan:  
dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut selaku Direksi PT. xxx berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasar PT. xxx, berkedudukan di ..... yang Anggaran Dasarnya (beserta perubahannya) (jika telah ada

<sup>1</sup> Surat Kuasa ini diperlukan untuk seluruh pelaksanaan transaksi valuta asing dengan Bank, tidak hanya terkait dengan Formulir Rencana Kebutuhan Valuta Asing.

perubahan Anggaran Dasar) (berturut-turut) telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal ..... No....., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor ....., selanjutnya disebut PEMBERI KUASA<sup>2</sup>; atau

2. DALAM HAL PEMBERI KUASA ADALAH SALAH SATU DIREKTUR DAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM PEMBERIAN KUASA INI MEMERLUKAN PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS:

CONTOH  
SURAT KUASA

Pada hari ini, ....., tanggal ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Identitas : .....

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi dari dan oleh karena itu, untuk dan atas nama serta sah mewakili PT xxx berkedudukan di ....., berdasarkan Pasal ..... Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akta Notaris ....., Nomor....., tanggal....., yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor .....Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor....., berikut perubahan-perubahan terakhir dengan Akta Notaris....., Nomor....., tanggal..... yang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal....., Nomor....., Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor....., dan untuk melaksanakan tindakan hukum dalam Perjanjian ini telah mendapatkan persetujuan tertulis dari komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Tertulis tanggal....., bermeterai cukup yang dilekatkan pada Perjanjian ini, selanjutnya disebut PEMBERI KUASA<sup>3</sup>; atau

3. DALAM HAL ANGGARAN DASAR ATAU KETENTUAN INTERNAL PT DIMAKSUD MENGATUR LAIN, AGAR RUMUSAN KOMPARISI PEMBERI KUASA DISESUIKAN.

<sup>2</sup> Dalam hal Pemberi Kuasa adalah Direksi.  
<sup>3</sup> Dalam hal Pemberi Kuasa berdasarkan Anggaran Dasarnya bertindak mewakili Direksi dan harus memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama Individu

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Identitas

:

.....
2. Nama Individu

:

.....
- Jabatan

:

.....
- Alamat

:

.....
- Nomor Identitas

:

.....

selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama<sup>4</sup>:

-----KHUSUS-----

untuk dan atas nama PEMBERI KUASA menandatangani pernyataan:

1. pembelian valuta asing terhadap rupiah di atas *threshold*;
2. pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar *threshold*;
3. penjualan valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *forward* atau *option* di atas *threshold*;
4. Transaksi Derivatif pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*; dan
5. Transaksi *forward* atau *option* penjualan valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar *threshold* yang akan diselesaikan secara *netting*.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

<sup>4</sup> Pemberian kuasa dapat diberikan kepada 1 (satu) pihak atau lebih.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

PENERIMA KUASA

- 1. Nama Jelas  
Jabatan
- 2. Nama Jelas  
Jabatan

PEMBERI KUASA

Tanda tangan di atas meterai cukup

Nama Jelas  
Jabatan

B. PENYUSUNAN SURAT KUASA UNTUK PERUSAHAAN/BADAN/LEMBAGA SELAIN PT

Penyusunan surat kuasa untuk perusahaan/badan/lembaga selain PT agar rumusan komparisi pemberi kuasa disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan/badan/lembaga atau ketentuan internal tentang pendelegasian wewenang di masing-masing perusahaan/badan/lembaga.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO